



KANTOR UPBU MARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN(CALK)
TAHUNAN (Audited)
Periode 30 DESEMBER TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

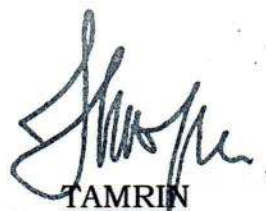
Kantor Upbu Marinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Upbu Marinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Upbu Marinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Waisai, 16 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor UPBU Marinda



TAMRIN

NIP. 19830511 200212 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	26
F. Pengungkapan Penting Lainnya	28
VI. Lampiran	29



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
MARINDA – WAISAI RAJA AMPAT**

Jl. Marinda – Waisai 98481 Telepon (0951) 3178082 Email : marinda.airport@gmail.com / bmnmarindapabar@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Waisai, 16 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor UPBU Marinda


TAMRIN

NIP. 19830511 200212 1 005

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp40.559.715 atau mencapai (49,40) persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp80.161.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp7.607.000.763 atau mencapai 81,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.382.324.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp57.788.643.821 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp22.680.150; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp57.765.963.671; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp57.788.643.821.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.559.711, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp9.983.044.299 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp9.942.484.588. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp9.942.484.584.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp60.145.985.157 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp9.942.484.584 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp18.702.200 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.566.441.048 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp57.788.643.821.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UPBU MARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2025				Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Diatas (Dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Perpajakan	B.2	0	0	0	0,00	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.3	80.161.000	40.559.715	(39.601.285)	50,60	33.347.626
Penerimaan Hibah	B.4	0	0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah		80.161.000	40.559.715	(39.601.285)	(49,40)	33.347.626
Belanja	B.5					
Belanja Pegawai	B.6	3.876.873.000	3.819.670.749	(57.202.251)	22,13	3.128.070.327
Belanja Barang	B.7	5.130.451.000	3.413.286.014	(1.717.164.986)	(21,28)	4.336.226.839
Belanja Modal	B.8	375.000.000	374.044.000	(956.000)	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	B.9	0	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		9.382.324.000	7.607.000.763	(1.775.323.237)	81,08	7.464.297.166

II. NERACA

KANTOR UPBU MARINDA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Piutang Perpajakan	C.1.4	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.7	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	C.1.8	0	0
Beban Dibayar di Muka	C.1.9	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.10	0	0
Persediaan	C.1.11	22.680.150	8.607.680
JUMLAH ASET LANCAR		22.680.150	8.607.680
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2	34.584.617.799	34.643.617.799
Gedung dan Bangunan	C.2.3	19.345.452.184	18.971.408.184
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	121.958.754.360	121.958.754.360
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	33.397.547.000	33.397.547.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(151.520.407.672)	0
JUMLAH ASET TETAP		57.765.963.671	208.971.327.343
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	0	0
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.3.4	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.4.1	0	0
Aset Tak Berwujud	C.4.2	0	0
Aset Lain-lain	C.4.3	59.000.000	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(59.000.000)	0
JUMLAH ASET LAINNYA		59.000.000	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5.5	0	0

Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.6	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.6		
Kewajiban Konsesi Jasa	C.6.1	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	57.788.643.821	60.145.985.157
JUMLAH EKUITAS		57.788.643.821	60.145.985.157
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		57.788.643.821	60.145.985.157

III. LAPORAN OPERASIONAL**KANTOR UPBU MARINDA
LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

Uraian	Cat.	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2	40.559.711	33.347.626
Pendapatan Hibah	D.3	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		40.559.711	33.347.626
BEBAN			
Beban Pegawai	D.4	3.819.670.749	3.128.070.327
Beban Persediaan	D.5	494.467.330	469.068.620
Beban Barang dan Jasa	D.6	734.435.995	1.293.444.928
Beban Pemeliharaan	D.7	2.052.323.258	2.146.862.275
Beban Perjalanan Dinas	D.8	117.986.961	418.243.336
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.9	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.10	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.11	2.745.457.806	3.712.892.218
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN		9.983.044.299	11.168.581.704
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.942.484.588)	(11.135.234.078)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	4	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.942.484.584)	(11.135.234.078)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(9.942.484.584)	(11.135.234.078)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR UPBU MARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	60.145.985.157	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.942.484.584)	(11.135.234.078)
DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			9
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	18.702.200	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		18.702.200	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	7.566.441.048	7.430.949.540
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.357.341.336)	60.145.985.157
EKUITAS AKHIR	E.6	57.788.643.821	60.145.985.157

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Upbu Marinda. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur

dengan andal,

- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset LAINLAIN pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari

12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun
-------------------------------	----------

- Aset LAINLAIN berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.851.472.000. Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan PNB	0	80.161.000
Pendapatan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	0	80.161.000
	9	
Belanja		
Belanja Pegawai	3.223.921.000	3.876.873.000
Belanja Barang	5.252.551.000	5.130.451.000
Belanja Modal	375.000.000	375.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	8.851.472.000	9.382.324.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp40.559.715

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.559.715 atau mencapai (49,40) persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp80.161.000. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Upbu Marinda terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan LAINLAIN dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	80.161.000	40.559.715	50,60
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	80.161.000	40.559.715	(49,40)

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	40.559.715	33.347.626	21,63
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	40.559.715	33.347.626	21,63

B.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan PNBP
Rp40.559.715

Realisasi Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp40.559.715 dan Rp33.347.626.

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	0	4.475.776	(100,00)
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.798.348	0	0,00
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika	37.013.275	28.871.850	28,20
Pendapatan Denda	748.088	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4	0	0,00
Jumlah Pendapatan Kotor	40.559.715	33.347.626	21,63
Pengembalian Pendapatan PNBP	0	0	0,00

Jumlah Pendapatan	40.559.715	33.347.626	21,63
-------------------	------------	------------	-------

B.3 Belanja

Realisasi Belanja
Rp7.607.000.763

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp7.607.000.763 atau 91,81% dari anggaran belanja sebesar Rp9.382.324.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.876.873.000	3.820.210.799	98,54
Belanja Barang	5.130.451.000	3.413.286.014	66,53
Belanja Modal	375.000.000	374.044.000	99,75
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	9.382.324.000	7.607.540.813	81,08
Pengembalian Belanja Pegawai	-	540.050	-
Pengembalian Belanja Barang	-	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	0	-
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	-	0	-
Jumlah	9.382.324.000	7.607.000.763	81,08

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,91 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Modal yang direalisasikan untuk perluasan lahan yang akan diperuntukkan sebagai pengembangan gedung pelayanan dan perkantoran serta area untuk aktivitas perkantoran. Peningkatan juga dikarenakan adanya renovasi atas gedung pelayanan.
2. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	3.819.670.749	3.128.070.327	22,13
Belanja Barang	3.413.286.014	4.336.226.839	(21,28)
Belanja Modal	374.044.000	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	7.607.000.763	7.464.297.166	1,91

B.4 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp3.819.670.749*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.819.670.749 dan Rp3.128.070.327. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 22,13 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penerimaan pegawai Non PNS dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.
2. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru tahun 2025

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.752.166.259	1.661.320.237	5,47
Belanja Lembur	44.519.000	44.766.000	(0,55)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.738.732.568	1.421.984.822	22,28
Jumlah Belanja Kotor	3.820.210.799	3.128.071.059	22,11
Pengembalian Belanja Pegawai	(540.050)	(732)	73677,32
Jumlah Belanja	3.819.670.749	3.128.070.327	22,13

B.5 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp3.413.286.014

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.413.286.014 dan Rp4.336.226.839. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 21,28% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama,
2. Peningkatan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan,
3. Peningkatan Belanja Jasa Profesi untuk mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat, dan

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	529.532.740	1.005.409.968	(47,33)
Belanja Barang Non Operasional	27.566.045	67.541.700	(59,19)
Belanja Persediaan	44.399.000	85.995.000	(48,37)
Belanja Jasa	177.337.210	220.493.260	(19,57)
Belanja Pemeliharaan	2.516.464.058	2.538.543.575	(0,87)
Belanja Perjalanan Dinas	117.986.961	418.243.336	(71,79)
Jumlah Belanja Kotor	3.413.286.014	4.336.226.839	(21,28)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.413.286.014	4.336.226.839	(21,28)

B.7 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp374.044.000

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp374.044.000 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh rencana peningkatan kapasitas kerja Satker Kantor Akuntansi beberapa tahun kemudian sehingga perlu membeli lahan baru untuk pembangunan Gedung Kantor nantinya. Selain itu, peningkatan belanja modal disebabkan adanya renovasi Gedung Kantor, pembelian peralatan yang akan

digunakan pada gedung yang sudah selesai direnovasi dan untuk peningkatan fasilitas jaringan untuk menunjang pelaksanaan tusi Satker.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.044.000	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	374.044.000	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	374.044.000	0	0,00

B.7.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp374.044.000 Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp374.044.000 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.044.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	374.044.000	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	374.044.000	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp22.680.150

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Upbu Marinda per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp22.680.150 dan Rp8.607.680.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Upbu Marinda per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Persediaan
Rp22.680.150

C.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp22.680.150 dan Rp8.607.680 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I
Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	17.585.350	8.607.680
Amunisi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	5.094.800	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0
Jumlah	22.680.150	8.607.680

Aset Tetap

Rp57.765.963.671

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Upbu Marinda per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp57.765.963.671 dan Rp208.971.327.343.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Upbu Marinda berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Peralatan dan Mesin

Rp34.584.617.799

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Upbu Marinda per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp34.584.617.799 dan Rp34.643.617.799.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel II
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	34.643.617.799
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	
Penghentian aset dari penggunaan	
Saldo Per 31 Desember 2025	34.584.617.799
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(32.000.960.051)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	2.583.657.748

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Gedung dan
Bangunan
Rp19.345.452.184

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp19.345.452.184 dan Rp18.971.408.184.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel III

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	18.971.408.184
Pembangunan Gedung	
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2025	19.345.452.184
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.774.878.950)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	16.570.573.234

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp121.958.754.360

C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp121.958.754.360 dan Rp121.958.754.360 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	121.958.754.360
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	121.958.754.360
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	121.958.754.360

Mutasi tambah:

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp33.397.547.000

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.397.547.000 dan Rp33.397.547.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel V
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	33.397.547.000
-	-
-	-
Saldo Per 31 Desember 2022	33.397.547.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	33.397.547.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp151.520.407.672

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp151.520.407.672 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel VI
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	34.584.617.799	(32.000.960.051)	2.583.657.748
2.	Gedung dan Bangunan	19.345.452.184	(2.774.878.950)	16.570.573.234
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.958.754.360	0	121.958.754.360
4.	Aset Tetap Lainnya	33.397.547.000	0	33.397.547.000

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya
Rp59.000.000

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Upbu Marinda per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp59.000.000 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Upbu Marinda terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset LAINLAIN.

C.4.1. Aset LAINLAIN

Aset LAINLAIN per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp59.000.000 dan Rp0. Aset LAINLAIN berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Upbu Marinda.

Adapun mutasi Aset LAINLAIN adalah sebagai berikut:

Tabel VII
Rincian Mutasi Aset LAINLAIN

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2022	59.000.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(59.000.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	0

Transaksi penambahan dan pengurangan aset LAINLAIN dapat dijelaskan sebagai berikut: Rincian Aset LAINLAIN berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp59.000.000 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel VIII
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2025

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset LAINLAIN			
4.	Aset Tetap	59.000.000	59.000.000	0

	yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan			
Jumlah		59.000.000	59.000.000	0
Total		59.000.000	59.000.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Upbu Marinda per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0*

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Upbu Marinda.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0*

C.5.3. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, h)

*Kewajiban Jangka
Panjang Rp 0*

C.6. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang Kantor Upbu Marinda per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Ekuitas

Rp57.788.643.821

C.7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp57.788.643.821 dan Rp60.145.985.157. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp60.145.985.157

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp60.145.985.157 dan Rp0.

Defisit LO

Rp9.942.484.584

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp9.942.484.584 dan Rp11.135.234.078. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Rp0
Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025.

Selisih
Revaluasi Aset
Rp0

E.4.2. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi
Rp18.702.200

E.4.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp18.702.200 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel IX

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	(18.702.200)
Jumlah	18.702.200

Koreksi
LAINLAIN Rp0

E.4.4. Koreksi LAINLAIN

Koreksi LAINLAIN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp7.566.441.048

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.566.441.048 dan Rp7.430.949.540.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel X

Transaksi Antar Entitas TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(40.559.715)
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.607.000.763
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	7.566.441.048

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp40.559.715 sedangkan DKEL sebesar Rp7.607.000.763.

E.5.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2025 dan total Rp0 yang merupakan Hibah Langsung yang Belum Disahkan dari Tahun Anggaran Yang Lalu.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp57.788.643.8
21

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp57.788.643.821 dan Rp60.145.985.157.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Ketidaksesuaian Akun

Untuk menanggulangi hal tersebut, Kantor UPBU Marinda telah menindaklanjuti atas kesalahan Penginputan pada modul komitmen Ketidaksesuaian Kode Barang BMN (4040104001), yang seharusnya BAST dicatat dengan menggunakan kode Barang (7010101003) Kontruksi Dalam pengerjaan (KDP), Selanjutnya dilakukan Koreksi pencatatan jumlah menjadi Nol (Penghapusan), kemudian Melakukan perekaman KPD (Perolehan lainnya KDP) reklasifikasi ke kode yang benar pada aset tetap . langkah terakhir untuk menyelesaikan Proses perolehan KDP, Perlu dilakukan jurnal penyesuaian.

VI. LAMPIRAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Akuntansi Nomor: 009/BALAP.5/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Akuntansi Nomor: 018/BALAP.5/2021 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggun Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Bogor pada tanggal 05 Juli 2022 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Plt.Kuasa Pengguna Anggaran	: TAMRIN
Pejabat Pembuat Komitmen	: TAMRIN
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: LISA R.SALIM
Bendahara Pengeluaran	: ELKANA SALEO
Bendahara Penerimaan	: FERONIKA